



Melacak dana untuk mitra tak tergantikan

LAPORAN DAN *ROADMAP*

Lokakarya, Paris, 6-7 November 2023



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
KONTEKS PENDANAAN SAAT INI	4
<i>Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal merupakan mitra tak tergantikan.....</i>	<i>4</i>
<i>Pendanaan tidak sepadan dengan peran dan kebutuhan di lapangan</i>	<i>4</i>
Menyalurkan pendanaan ke lapangan.....	5
<i>Mekanisme pendanaan yang dibuat oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.....</i>	<i>6</i>
KONTEKS PELACAKAN SAAT INI	7
<i>Pelacakan sangat penting untuk memandu strategi kami.....</i>	<i>7</i>
<i>Pelacakan perlu ditingkatkan dengan berbagai cara-di semua tingkatan.....</i>	<i>8</i>
<i>Adalah penting untuk memiliki data spesifik tentang dampak dan pendekatan terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.....</i>	<i>8</i>
<i>Pelaporan donor</i>	<i>8</i>
Menggabungkan pelaporan donor	9
Meningkatkan sistem pelaporan donor	11
Keterlacakan pendanaan melalui saluran yang berbeda.....	11
Data tentang pendanaan yang menjangkau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	13
Risiko dan kepercayaan.....	14
PARIS ROADMAP UNTUK MELACAK DANA	15
<i>Kita perlu membangun ekosistem data berdasarkan kerangka kerja umum.....</i>	<i>15</i>
<i>Donor</i>	<i>15</i>
<i>Mitra dan sekutu</i>	<i>16</i>
<i>Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.....</i>	<i>17</i>
<i>Dialog lebih lanjut, kolaborasi, dan kemitraan</i>	<i>17</i>
<i>Sumber daya.....</i>	<i>18</i>



PENDAHULUAN

Pada tanggal 6-7 November 2023, Shandia dan Charapa menyelenggarakan lokakarya multipihak di Paris.¹

Lokakarya ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara meningkatkan dan melembagakan pelacakan pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Secara khusus, para peserta membicarakan:

- Pengalaman dalam melacak dan memantau pendanaan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal,
- Cara untuk meningkatkan pemantauan aliran pendanaan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, dengan tujuan meningkatkan transparansi, koordinasi, dialog dan strategi

Lebih dari 65 perwakilan organisasi, jaringan, platform dan mekanisme pendanaan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, donor bilateral, pemberi dana filantropi, badan-badan PBB dan multilateral, LSM dan peneliti bergabung dalam lokakarya ini, yang menyediakan penerjemahan simultan ke dalam 4 bahasa, dan memfasilitasi partisipasi online dalam sesi pleno.

Beragamnya kelompok peserta merefleksikan kompleksitas tantangan yang ada, dan memberikan ruang bagi banyak orang untuk berbagi pengalaman, dimana setiap orang berkontribusi dan belajar. Diskusi tersebut menegaskan bahwa solusi hanya dapat ditemukan melalui dialog dan kolaborasi. Hal ini juga tercermin dalam hasil utama lokakarya, **Paris Roadmap for Tracking of Funds**, yang menangkap rekomendasi-rekomendasi utama yang diajukan. Implementasi *Roadmap* ini memerlukan koordinasi, kreasi bersama, dan upaya yang saling melengkapi, di mana donor, lembaga multilateral, masyarakat sipil, Masyarakat Adat, dan Komunitas Lokal dilibatkan.

Sebagai penyelenggara, kami berterima kasih kepada seluruh peserta lokakarya atas kontribusi mereka dalam membantu menyelesaikan kesenjangan sistemik yang telah lama tertunda, dan berharap dapat mengikuti *roadmap* tersebut, bersama Anda semua.

¹ Lokakarya ini diselenggarakan dengan dukungan dari *Indigenous Peoples Rights International*, *International Funders of Indigenous Peoples*, *Rainforest Foundation Norwegia*, *Rainforest Foundation US*, *Rights and Resources Initiative*, *Tinta*, *United Nations Development Programme* dan *UN Permanent Forum on Indigenous Issues* dengan dukungan finansial dari *Ford Foundation*, *David dan Lucile Packard Foundation*, dan *Christensen Fund*.



KONTEKS PENDANAAN SAAT INI

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal merupakan mitra tak tergantikan

Kurangnya data dan statistik tentang Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal masih menjadi hambatan utama dalam memahami dan menanggapi situasi mereka. Di beberapa daerah, data demografi dasar pun masih kurang. Jika tersedia, data atau estimasi yang ada menyoroti diskriminasi yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara luas, tapi juga peran penting mereka dalam melawan dampak negatif perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Secara global, Masyarakat Adat mewakili sekitar 6,2 % dari populasi dunia tetapi 18,7 % dari orang dengan tingkat kemiskinan ekstrem.ⁱ Diperkirakan 36% dari hutan utuh yang tersisa di dunia, setidaknya 24% dari karbon di atas tanah ada di hutan tropisⁱⁱ dan hingga 80% dari keanekaragaman hayati hutan yang tersisa di dunia ditemukan di dalam wilayah Masyarakat Adat.

Kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam secara berkelanjutan, berdasarkan pengetahuan tradisional dan praktik untuk mata pencaharian mereka, sangatlah penting dalam penyusunan solusi untuk krisis yang saling tumpang tindih yang saat ini dihadapi dunia.

Oleh karena itu, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah mitra yang sangat penting dalam mencapai target *Paris Agreement* tentang perubahan iklim, *Global Biodiversity Framework* dan *2030 Agenda on Sustainable Development*.

Peran ini harus tercermin dalam pendekatan dan bahasa yang kita gunakan. Tidaklah dapat diterima lagi adopsi dari pendekatan perlindungan minimum “tidak membahayakan” atau berbicara tentang Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai penerima manfaat, atau kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Hubungan kita harus dibingkai sebagai kemitraan, berdasarkan pengakuan atas hak dan kontribusi kita di semua wilayah di dunia dan di semua ekosistem.

Pendanaan tidak sepadan dengan peran dan kebutuhan di lapangan

Meskipun tidak ada data akurat yang tersedia, estimasi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pendanaan internasional untuk keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang dialokasikan untuk Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal.

Rainforest Foundation Norwegia memperkirakan bahwa pendanaan untuk hak penguasaan dan pengelolaan hutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal berjumlah kurang dari 1 persen dari bantuan pengembangan iklim internasional dari tahun 2011-2020.ⁱⁱⁱ *International Funders for Indigenous Peoples* memperkirakan bahwa hanya 0,6% dari dana yang dilaporkan ke database CANDID (terutama pendanaan filantropis) ditandai sebagai “menguntungkan Masyarakat Adat”. Dari jumlah terbatas ini, 88,7 % disalurkan kepada Masyarakat Adat di Amerika Utara.

Persyaratan donor yang kompleks dan birokratis, format aplikasi yang bersifat kompetitif, pendanaan jangka pendek dan dengan skala kecil, hambatan bahasa, peraturan pemerintah yang membatasi, diskriminasi dan kapasitas kelembagaan yang rendah tetap menjadi hambatan besar untuk mengakses pendanaan.



Hambatan lainnya yang selalu ada adalah lemahnya keselarasan dengan prioritas pembangunan yang ditentukan sendiri oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di lapangan. Sementara dukungan diperlukan untuk semua Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang berada di garis depan dalam melawan dampak negatif perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pendanaan sering dialokasikan untuk daerah atau ekosistem tertentu sementara beberapa wilayah lainnya masih tidak terlihat oleh donor. Selain itu, masyarakat sering memiliki visi holistik untuk pembangunan mereka, sementara pendanaan biasanya dialokasikan untuk topik atau rangkaian kegiatan tertentu saja. Lebih lanjut, mereka juga membutuhkan fleksibilitas dan dukungan darurat, untuk melawan penambangan, kriminalisasi, serangan terhadap pembela hak tanah, perampasan tanah dan kejadian lain di luar kendali mereka.

Kebutuhan akan dukungan inti jangka panjang, yang memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan tampak nyata. Ketika pengembangan kapasitas dan kebutuhan untuk bantuan teknis didefinisikan dari masyarakat, dan kapasitas lokal dikonsolidasikan, hal ini dapat secara drastis mengurangi biaya transaksi. Pada akhirnya, pendanaan harus memungkinkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk mengadvokasi hak-hak mereka di semua tingkatan, termasuk dalam mencapai reformasi hukum dan kebijakan yang diperlukan.

Menyalurkan pendanaan ke lapangan

Menyadari peran, kebutuhan, dan hambatan tertentu yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal, beberapa lembaga telah mengembangkan inisiatif pendanaan yang ditargetkan. Inisiatif pendanaan ini termasuk:

- 1) Program Hibah Kecil (*Small Grants Programme - SGP*) dari *Global Environmental Facility (GEF)*. Sejak tahun 1992, SGP yang diimplementasikan UNDP telah menjadi modalitas utama keterlibatan Masyarakat Adat dengan GEF, dengan lebih dari seribu proyek yang telah didukung. SGP mengkompilasi data terpilah tentang persentase proyek yang mendukung Masyarakat Adat (di atas 40% di negara-negara yang relevan) serta persentase proyek per wilayah yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dibandingkan proyek yang menguntungkan Masyarakat Adat.
- 2) *Indigenous Peoples Assistance Facility (IPAF)* dari *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, didirikan pada tahun 2007 untuk memperkuat masyarakat dan organisasi Masyarakat Adat. IPAF membiayai proyek-proyek kecil yang menumbuhkan pengembangan yang digerakkan sendiri, oleh karena itu semua proyek diimplementasikan oleh organisasi Masyarakat Adat^{iv}. Keterlibatan IFAD dengan Masyarakat Adat dipandu oleh kebijakan khusus dan oleh Forum Masyarakat Adat dua tahunan di IFAD yang merupakan platform untuk dialog berkelanjutan dengan manajemen senior untuk menilai keterlibatan IFAD dengan Masyarakat Adat dan mempromosikan partisipasi mereka dalam kegiatan yang didukung IFAD di semua tingkatan.

Inisiatif ini relatif berskala kecil, dan ada kesan bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal diminta untuk “melakukan hal-hal besar dengan uang kecil”. Secara positif, di COP 26, *Forest Tenure Funders Group* membuat Ikrar untuk menyediakan 1,7 miliar USD untuk memperkuat hak-hak penguasaan dan penjagaan hutan dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal selama lima tahun.^v Dengan arah yang sama, *Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)* yang baru saja didirikan akan mendedikasikan 20 persen dari sumber dayanya untuk mendukung inisiatif yang dipimpin Masyarakat Adat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Inisiatif ini berpotensi menghasilkan tambahan 4 miliar USD dalam pendanaan^{vi}.

Meskipun ini merupakan hal yang positif, situasi pendanaan di lapangan tidak berubah secara signifikan, sehingga meninggalkan kesan bahwa sebagian besar pendanaan tidak mencapai lembaga di tingkat lokal.



Forest Tenure Funders Group memiliki komitmen untuk meningkatkan pendanaan langsung. Namun, data yang dikumpulkan oleh Shandia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 0,19 % dari dana yang bersumber dari salah satu donor bilateral, dan 7 % dari dana yang bersumber dari salah satu penyandang dana filantropis ke Ikrar tersebut ditransfer langsung ke organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal^{vii}.

Data yang dikumpulkan oleh Charapa pada tahun 2022 hanya mengidentifikasi 6 organisasi, jaringan dan mekanisme pendanaan Masyarakat Adat dengan anggaran di atas 1 juta USD di seluruh hutan tropis Afrika, Asia dan Amerika Latin^{viii}. Data ini menggambarkan bahwa situasi pendanaan di lapangan tidak berubah secara signifikan.

Mengingat beragamnya situasi, tidak ada model sederhana atau tunggal dalam memberikan dukungan yang efisien kepada Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal. Persyaratan secara umum menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan disesuaikan dengan beragam realitas di lapangan dan bahwa Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal harus berpartisipasi dalam dialog dan pengambilan keputusan tentang mekanisme pendanaan yang paling relevan dan efisien untuk mereka.

Mekanisme pendanaan yang dibuat oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Menanggapi situasi pendanaan saat ini, Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal telah mulai mengembangkan mekanisme mereka sendiri untuk pendanaan langsung. Mekanisme ini termasuk:

- *AYNI Indigenous Women's Fund*, yang didirikan oleh *International Indigenous Women's Forum*, yang mendukung organisasi perempuan Adat dalam memperkuat kapasitas mereka dan dalam implementasi proyek pengembangan ekonomi, lingkungan dan sosial^{ix}.
- *Fondo Territorial Mesoamericano* (FTM), yang merupakan mekanisme pendanaan inovatif oleh dan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, didirikan oleh *Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests* (AMPB)^x.
- *Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund* (IPAS), yang merupakan mekanisme regional yang ditetapkan melalui proses regional yang representatif. IPAS menyediakan pendanaan langsung untuk Masyarakat Adat di 14 negara di Asia.
- Dana Nusantara, yang didirikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja sama dengan dua organisasi massa lainnya, adalah mekanisme unik untuk menyediakan pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh Indonesia^{xi}.

Mekanisme ini memiliki fokus yang kuat pada penguatan kapasitas di lapangan melalui pra-investasi; untuk tidak hanya mendukung kegiatan, tetapi membangun kapasitas teknis, merumuskan prioritas, merumuskan indikator dampak dan mengukur dampak. Banyak dari mekanisme ini yang dibentuk baru-baru ini dan masih dalam proses mengkonsolidasikan kapasitas kelembagaan dan memperbesar penjangkauan mereka. Saat ini, pendanaan donor untuk mekanisme ini masih kecil tetapi meningkatnya kapasitas mekanisme pendanaan ini memberikan peluang yang jelas untuk meningkatkan pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal.

Selain itu, mekanisme ini memiliki mekanisme tata kelola yang inklusif dengan fokus pada perempuan, orang-orang dengan disabilitas dan pemuda yang ditandai oleh kepemilikan yang kuat. Desain mereka didasarkan pada konsultasi yang luas supaya selaras dengan prioritas dan rencana masyarakat sendiri dan untuk memberikan respon yang cepat pada keadaan darurat dan perubahan situasi di lapangan. Karena mekanisme pendanaan ini memiliki wawasan unik tentang situasi di lapangan, mereka memiliki potensi yang kuat untuk mengumpulkan data tentang situasi pendanaan, prioritas dan kesenjangan di lapangan.



Platform Shandia didirikan oleh Aliansi Global Komunitas Teritorial untuk mempromosikan dan memfasilitasi pendanaan langsung, terprediksi, efektif, dan berkelanjutan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal^{xii}. Shandia bukanlah mekanisme untuk mentransfer dana, tetapi mekanisme untuk memenuhi sejumlah fungsi strategis, termasuk:

- Memfasilitasi dialog strategis dan berkelanjutan dengan donor
- Pertukaran pengalaman dan praktik baik untuk transparansi dan akuntabilitas
- Memantau status dan tren pendanaan

Ke depan, Forum Shandia tahunan akan mengumpulkan mekanisme pendanaan regional dan nasional yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, donor utama, sekutu strategis dan sumber daya untuk mengidentifikasi hambatan, praktik baik dan pelajaran yang didapat untuk meningkatkan pendanaan langsung; menyetujui prosedur dan format yang disederhanakan untuk memastikan akuntabilitas; mengidentifikasi kesenjangan, prioritas, dan peluang pendanaan; pertukaran pengalaman dengan pemantauan dan menciptakan ruang untuk pembangunan kapasitas dan pembelajaran bersama.

KONTEKS PELACAKAN SAAT INI

Pelacakan sangat penting untuk memandu strategi kami

Saat ini, kami mengalami kesulitan menjawab pertanyaan mendasar tentang berapa jumlah dana yang disalurkan pada siapa, untuk tujuan apa dan dampaknya seperti apa. Sementara data tentang pendanaan bukanlah tujuan itu sendiri, data ini sangat penting untuk memandu upaya kami dalam melawan dampak negatif perubahan iklim, melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Lebih khusus lagi, data yang lebih baik akan memungkinkan kami:

- Mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan pendanaan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
- Membuat pendanaan lebih efisien, termasuk dengan menilai modalitas pendanaan terbaik dalam konteks yang sesuai
- Menumbuhkan kolaborasi dan komplementaritas antara donor bilateral dan filantropis, termasuk di tingkat negara
- Memastikan donor bertanggung jawab atas komitmen mereka, termasuk untuk Ikrar dan target yang spesifik (seperti target untuk mengalokasikan 20% dari *Global Biodiversity Framework Fund* kepada Masyarakat Adat)
- Menghindari pendanaan ganda dan penghitungan ganda, mis. yang melibatkan beberapa ikrar
- Melaporkan dampak, termasuk juga dampak politik, yang bisa membantu dalam mendapatkan pendanaan tambahan
- Mengukur keberhasilan dalam memobilisasi lebih banyak sumber daya dan mengarahkan donor baru untuk melakukan pendanaan pada bidang yang kekurangan pendanaan
- Mencocokkan pendanaan dengan kebutuhan, untuk mematahkan pola ketidakadilan sistemik
- Memastikan dimasukkannya perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
- Memberdayakan Masyarakat Adat melalui data yang dihasilkan, dipahami dan divalidasi oleh otoritas mereka
- Membantah informasi pemerintah yang menyesatkan, yang dalam beberapa konteks berkontribusi pada pengecualian masyarakat adat



Pelacakan perlu ditingkatkan dengan berbagai cara-di semua tingkatan

Ada berbagai macam tantangan untuk meningkatkan pelacakan dan menghasilkan data yang lebih baik dan ditemukan di berbagai tingkatan. Beberapa memiliki karakter yang lebih konseptual dan mempengaruhi semua aktor sementara tantangan lain lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu seperti donor, lembaga PBB, LSM atau organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Sub bagian berikut menguraikan tantangan utama yang diidentifikasi.

Adalah penting untuk memiliki data spesifik tentang dampak dan pendekatan terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Ada kecenderungan yang meningkat untuk mencampurkan berbagai pemegang hak dan mitra dengan menggunakan kategori gabungan dan singkatan seperti IPLC (masyarakat adat dan komunitas lokal) dan BIPOC (orang berkulit hitam, Masyarakat Adat, orang dengan kulit berwarna). Hal ini mempersulit dalam memperoleh dan menghasilkan data yang lebih spesifik dan membatasi analisis yang lebih dalam tentang dampak dan ruang lingkup investasi melalui data yang terpilah. Untuk menghasilkan data yang bermanfaat dan menunjukkan solusi yang tepat, kategori yang digunakan harus spesifik dan selaras dengan kriteria dan ketentuan yang disepakati secara internasional.

Masyarakat Adat terdiri dari kelompok pemegang hak kolektif tertentu, yang diakui di bawah hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Hak-hak Masyarakat Adat diabadikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, dan Konvensi ILO No. 169 memberikan kriteria spesifik untuk mengidentifikasi orang-orang ini.

Komunitas Lokal dicakup dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan instrumen internasional lainnya terkait lingkungan dan iklim. CBD menyebut Komunitas Lokal dengan "*mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan* (Pasal 8 (j)). Dalam konteks keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, adalah relevan untuk memahami situasi dan peran Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tetapi tanpa menggabungkan dua kategori yang berbeda ini. Penting juga untuk dipahami dan dihormati bahwa di banyak daerah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah membentuk kemitraan atau organisasi bersama. Oleh karena itu, dalam konteks pengumpulan data, merupakan hal yang penting untuk dapat mengumpulkan dan memisahkan data sehingga mencerminkan realitas, ruang lingkup, dampak, dan kemitraan di lapangan.

Pelaporan donor

Donor berkomitmen atas transparansi dan secara teratur melaporkan alokasi pendanaan mereka, tetapi mereka tidak memiliki standar yang disepakati secara internasional untuk secara khusus melacak pendanaan yang dialokasikan kepada Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal. Hal ini jelas merupakan hambatan utama dalam memahami kontribusi tiap donor dan untuk menggabungkan data dari beberapa donor.

Forest Tenure Funders Group telah melakukan upaya yang berharga untuk mengumpulkan data dan melaporkan kontribusi kolektif mereka ke *Forest Tenure Pledge*. Namun, bagi banyak donor, pelaporan pendanaan langsung mereka kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal didasarkan pada perkiraan, metodologi *ad hoc* dan survei individu, yang kompleks dan memakan waktu, dan memiliki risiko salah tafsir atau salah perhitungan ketika menggabungkan berbagai data yang beragam.



Menggabungkan pelaporan donor

Banyak donor melaporkan ke lembaga-lembaga seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Inisiatif Transparansi Dana Bantuan Internasional (IATI) atau CANDID yang dalam berbagai cara memiliki mandat untuk mengumpulkan dan mempublikasikan data tentang keuangan pembangunan.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), melalui Komite Bantuan Pengembangan (OECD-DAC) melacak dan mengukur Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan aliran pendanaan lainnya. Pelaporan ke OECD adalah hal yang wajib bagi donor bilateral, sebagai cara melacak komitmen mereka untuk memberikan 0,7% dari Pendapatan Nasional Bruto (GNI) sebagai ODA. Banyak lembaga multilateral dan yayasan filantropis besar yang bekerja untuk pengembangan juga melaporkan kepada OECD. Donor melaporkan kepada OECD berdasarkan standar pengukuran umum yang menentukan siapa yang menghabiskan apa, di mana, bagaimana dan untuk tujuan apa. Standar OECD juga mencakup “penanda kebijakan” yang melacak tujuan spesifik kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender, orang dengan disabilitas; perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dan lainnya. Sistem ini tidak termasuk penanda kebijakan khusus untuk Masyarakat Adat.

Pada tahun 2023, Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat membuat rekomendasi khusus kepada OECD-DAC untuk memasukkan penanda kebijakan dalam sistem statistiknya, untuk memfasilitasi pelacakan pendanaan yang dialokasikan untuk Masyarakat Adat di semua sektor^{xiii}.

Inisiatif Transparansi Dana Bantuan Internasional (IATI) adalah inisiatif global untuk meningkatkan transparansi pembangunan dan sumber daya kemanusiaan. Lebih dari 1.500 organisasi, termasuk pemerintah pendonor, lembaga keuangan pembangunan, lembaga PBB, LSM, yayasan dan organisasi sektor swasta menerbitkan informasi tentang pengeluaran dan kegiatan mereka melalui IATI. IATI mencakup data tentang pengeluaran masa lalu, rencana anggaran di masa depan, lokasi, sektor, hasil dan akses ke dokumen proyek strategis. Saat ini, data IATI tersedia pada lebih dari 1 juta proyek pengembangan dan kemanusiaan. Standar IATI tidak termasuk penanda bagi Masyarakat Adat tetapi melalui pencarian kata dapat memberikan informasi yang berguna tentang proyek yang menyebutkan istilah ini dalam deskripsi naratif. Namun, hasil pencarian ini memerlukan pemilahan dan analisis lebih lanjut.

Candid^{xiv} adalah organisasi nirlaba yang menyediakan data dan wawasan komprehensif tentang pendanaan filantropis, khususnya dari yayasan yang berbasis di AS. Direktori Yayasannya berisi informasi tentang lebih dari 242.000 pembuat hibah dan memberikan informasi tentang pendanaan berdasarkan jumlah, subjek dan distribusi geografis.

Semua lembaga ini memiliki database yang dapat dicari, tetapi sistem statistik mereka tidak diatur untuk secara khusus melacak pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Oleh karena itu, tidak ada metodologi, definisi, istilah atau klasifikasi yang umum untuk memastikan perbandingan data. Selain itu, pendanaan untuk Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal sering kali merupakan komponen yang lebih kecil dari program yang lebih besar, dan oleh karena itu ada kebutuhan untuk memecah angka anggaran untuk menghindari penaksiran yang terlalu tinggi pada tingkat pendanaan.

Tantangan lain adalah bahwa database OECD hanya menyediakan informasi tentang penerima tingkat pertama. Karena sebagian besar dana disalurkan melalui jenis organisasi lain, data yang ada tidak menunjukkan berapa banyak dana yang pada akhirnya ditransfer ke masing-masing organisasi dan wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Satu-satunya cara untuk memperkirakan transfer dana tersebut adalah dengan menetapkan indikator proxy dan mencari nama-nama organisasi Masyarakat Adat atau



Komunitas Lokal yang dikenal di antara organisasi pelaksana. Namun, cara itu diketahui memiliki tingkat ketidaktepatan yang tinggi.

Sistem IATI memungkinkan pengguna untuk ‘mengikuti aliran uang’ dengan:

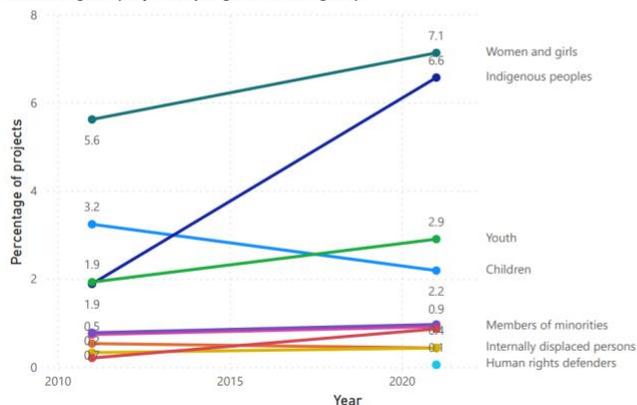
- Menentukan identitas organisasi yang terlibat dalam kegiatan tertentu, dan peran organisasi tersebut (misalnya, pendanaan atau implementasi). Penentuan ini kemudian memungkinkan pengguna data untuk memberikan analisis kontekstual lebih lanjut (misalnya, dengan mengidentifikasi organisasi yang dipimpin Masyarakat Adat)
- Merinci transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk penyedia dan organisasi penerima, dan jenis transaksi (misalnya, ikrar, pencairan atau pengeluaran)
- Menentukan hubungan antara pendanaan yang dilaporkan secara terpisah (misalnya, aktivitas orang tua atau anak) sehingga aliran dana yang kompleks dapat dipahami.

Ada hambatan praktis dalam mengikuti pendekatan ini, tetapi dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Berdasarkan deskripsi proyek naratif dalam database, kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mengidentifikasi proyek yang bagaimanapun melibatkan masyarakat adat, baik sebagai kategori generik, atau diidentifikasi melalui nama masing-masing masyarakat. Identifikasi terakhir, bagaimanapun, akan membutuhkan penyusunan daftar nama spesifik Masyarakat Adat. Mengidentifikasi pendanaan untuk Komunitas Lokal dengan penggunaan AI merupakan tantangan yang lebih besar, karena istilah ini digunakan dengan cara yang berbeda oleh donor yang berbeda, tanpa referensi untuk kriteria identifikasi yang disepakati secara internasional.

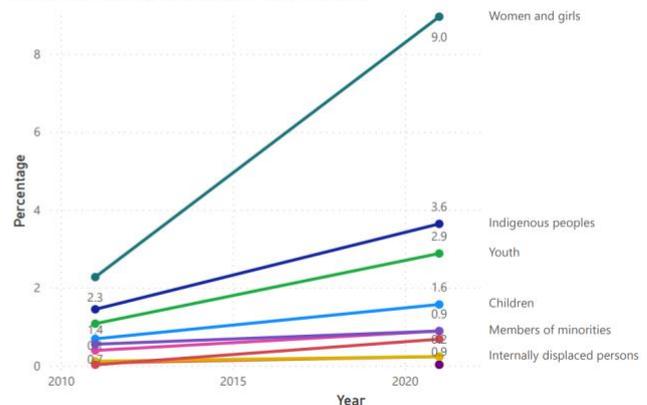
IATI

Percentage of projects by Rights-holder group



OECD

Percentage of projects by Rights-holder group



Tren dalam jumlah proyek dalam database IATI dan OECD, mengesampingkan berbagai kelompok pemegang hak. Analisis yang dihasilkan oleh Danish Institute for Human Rights, memanfaatkan algoritma dengan klasifikasi teks^{xv}.

Masyarakat sipil dan lembaga penelitian² telah menerbitkan laporan berharga berdasarkan data OECD, IATI dan CANDID, yang memberikan perkiraan tentang pendanaan bagi Masyarakat Adat dan/atau Komunitas

² Lihat misalnya: *Campaign for Nature, International Funders for Indigenous Peoples, Indufor, Overseas Development Institute, Rainforest Foundation Norway dan Rights and Resources Initiative*



Lokal pada sektor dan konteks tertentu. Analisis data ini membutuhkan pemilahan dan pembersihan jutaan data, mencari kata-kata kunci, menetapkan indikator proxy, serta tinjauan dan verifikasi manual. Cara kerja seperti ini rumit, mahal dan memakan waktu, dan sulit dipertahankan ke depannya. Cara kerja ini juga akan tetap memiliki margin untuk ketidakpastian. Untuk meminimalkan risiko kesalahan, semua data masih membutuhkan verifikasi tambahan oleh donor, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Dari penjelasan di atas menunjukkan perlunya solusi yang ramping dan sistemik dalam memastikan standar umum untuk pelaporan donor dan agregasi data dalam lembaga-lembaga yang telah mapan ini untuk memantau keuangan dari proyek pengembangan.

Meningkatkan sistem pelaporan donor

Donor bilateral, penyandang dana filantropis dan lembaga seperti OECD, IATI dan CANDID semuanya dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlacakan pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Upaya peningkatan ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka kerja umum sehingga:

- 1) Donor akan merujuk pada istilah dan klasifikasi umum ketika melaporkan dukungan mereka kepada Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal, melalui deskripsi proyek naratif, penandaan batas anggaran untuk dukungan tidak langsung atau langsung dan penandaan proyek berdasarkan penanda kebijakan dalam sistem untuk pelaporan agregat (OECD, IATI dan CANDID, antara lainnya).
- 2) OECD dan OATI akan menggabungkan penanda kebijakan khusus untuk Masyarakat Adat dalam sistem statistik mereka, untuk memfasilitasi identifikasi proyek yang relevan dengan Masyarakat Adat, dan untuk memfasilitasi agregasi data di berbagai donor.

Untuk membuat upaya ini dapat diterapkan, membutuhkan harmonisasi di antara donor dan komitmen dari beberapa donor besar/penyedia data seperti donor bilateral yang berpengaruh dan penyandang dana filantropis. Argumen utama dalam hal ini adalah, alih-alih memaksakan beban pelaporan tambahan pada donor, pendekatan ini akan meringankan persyaratan pelaporan yang ada dari ikrar dan target tertentu, sementara juga menghasilkan data yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dukungan mereka. Dalam jangka panjang, upaya ini akan memberikan sumber data berlembaga dan berkelanjutan yang dapat diandalkan dan dibandingkan sehingga memungkinkan pemantauan berkelanjutan dari waktu ke waktu, di seluruh wilayah dan sektor.

Keterlacakan pendanaan melalui saluran yang berbeda

Berbagai jenis organisasi yang menyalurkan dana mereka untuk mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal umumnya dikenal sebagai “perantara”. Perantara adalah organisasi apa pun yang tidak didirikan atau dipimpin oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal, yang menerima pendanaan dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal, termasuk melalui transfer dana. Oleh karena itu, organisasi perantara bisa terdiri dari bank-bank multilateral dan regional, lembaga PBB, pemerintah nasional, LSM internasional, mekanisme yang sesuai serta LSM kecil dan lokal dan organisasi pendukung. Dengan demikian, istilah ‘perantara’ bersifat sangat luas dan terdiri dari begitu banyak aktor yang berbeda sehingga tidak memberikan makna yang jelas ketika membicarakan mereka secara umum.

Sebaliknya, kita perlu membedakan antara berbagai kategori yang berbeda dari institusi-institusi yang ada dan mengeksplorasi cara untuk menghasilkan data tentang kategori tertentu, yang akan memungkinkan analisis yang lebih mendalam dari keterbatasan, kontribusi, keunggulan komparatif, biaya dan dampak



masing-masing. Mengingat keragaman dari organisasi “perantara” ini, mengatasi tantangan pengumpulan data akan memerlukan solusi spesifik untuk organisasi-organisasi dalam kategori tertentu.

Seperti yang dilaporkan donor pada tingkat pertama penerima dana, sebenarnya dimungkinkan untuk menyusun estimasi tentang alokasi pendanaan mereka untuk berbagai jenis organisasi. Sebagai contoh, FTFG melaporkan bahwa 51% pencairan pada tahun pertama Forest Tenure Pledge dialokasikan untuk LSM internasional, 17% untuk pemerintah nasional, 10% untuk lembaga multilateral dan persentase yang lebih kecil untuk mekanisme dan pendanaan *regranting* internasional atau regional, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, LSM nasional dan lainnya^{xvi}

PBB dan lembaga multilateral lainnya

Secara umum, lembaga multilateral dan lembaga keuangan dapat melacak pendanaan yang secara eksplisit dialokasikan untuk Masyarakat Adat melalui mekanisme hibah khusus tetapi tidak dapat terus melacak pendanaan dalam portofolio pinjaman dan proyek yang lebih luas.

UN-system ditugaskan untuk mencapai tujuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 dan 42 dari Deklarasi tersebut. Pada tahun 2014, Majelis Umum PBB meminta pengembangan *System-Wide Action Plan (SWAP)* untuk lebih lanjut melakukan pendekatan yang koheren dalam melakukan aksi, di seluruh *UN-system*. *Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues*, dengan 45 anggota di seluruh Sistem, sedang mengoordinasikan implementasi SWAP. Grup tersebut saat ini sedang dalam proses merancang kerangka kerja indikator untuk menilai dan menyusun data agregat tentang aksi *UN-system* pada Masyarakat Adat di seluruh dunia, termasuk melalui *UN Sustainable Development Cooperation Frameworks* di tingkat negara. Dengan pilihan indikator yang tepat, kerangka kerja ini dapat menjadi titik masuk untuk mengumpulkan data sistematis tentang tindakan *UN-system* sehubungan dengan Masyarakat Adat.

Sejumlah lembaga pengembangan dan keuangan multilateral, seperti Bank Dunia dan bank regional, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Green Climate Fund* dan IFAD telah mengembangkan perlindungan kelembagaan, untuk menghindari pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, termasuk melalui persyaratan untuk persetujuan gratis, didahulukan, dan diinformasikan dari komunitas yang terkena dampak. Aktivasi perlindungan ini memberikan peluang untuk memperkirakan jumlah proyek yang secara positif atau negatif mempengaruhi Masyarakat Adat tetapi tidak memberikan informasi tentang dana yang dialokasikan atau ditransfer ke Masyarakat Adat. Informasi ini akan membutuhkan analisis manual yang jauh lebih rinci.

Titik masuk lainnya adalah bahwa baik lembaga multilateral maupun lembaga inisiatif masyarakat sipil besar sering membentuk badan penasihat yang mencakup perwakilan yang dipilih sendiri dari Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal. Badan-badan semacam itu melakukan peran pemantauan yang penting tetapi sejauh ini tidak dilaporkan pada pendanaan dengan cara yang dapat diukur, dibandingkan atau dijumlahkan.

LSM Internasional

Sebagian besar pendanaan untuk Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal dialokasikan untuk LSM internasional. Sementara beberapa LSM ini dapat melaporkan dana yang ditransfer melalui mekanisme khusus, mereka umumnya tidak memiliki ketersediaan data tentang pendanaan dalam portofolio yang lebih luas atau pendanaan yang ditransfer ke organisasi dan wilayah Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal.



Juga tidak ada standar taksonomi atau pelaporan umum untuk memfasilitasi pembuatan data yang bisa dibandingkan antara LSM ini.

Salah satu cara mengatasi kesenjangan informasi tentang pendanaan ke dan melalui LSM internasional, adalah dengan memulai dari dalam daftar LSM internasional yang memiliki rekam jejak keterlibatan dengan Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal, dan meminta LSM ini untuk memberikan data berdasarkan satu standar umum yang disepakati.^{xvii}

Path to Scale adalah jaringan informal donor, mekanisme keuangan dan perantara mereka, yang bertujuan untuk memobilisasi setidaknya 10 miliar USD selama sepuluh tahun ke depan, untuk mengamankan hak tanah dan sumber daya, konservasi dan mata pencaharian Masyarakat Adat, Komunitas Lokal dan Masyarakat Keturunan Afrika. Jaringan ini dikoordinasikan oleh *Rights and Resources Initiative* dan bertemu secara teratur dan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman. Mengingat peran dan komposisinya yang saling berkaitan, *Path to Scale* berpotensi memainkan peran dalam menumbuhkan pengelolaan data dan pelaporan yang lebih baik oleh LSM internasional^{xviii}.

Data tentang pendanaan yang menjangkau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Salah satu kesenjangan data terbesar dan paling penting adalah data menyangkut pendanaan yang menjangkau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Laporan FTFG tentang persentase pencairan yang disediakan sebagai pendanaan langsung^{xix} dan beberapa perkiraan dapat dibuat dari persentase pendanaan donor individu yang dialokasikan langsung ke organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Namun, angka-angka ini tidak mencakup komunitas donor secara komprehensif, dan tidak mencakup dana yang ditransfer melalui saluran lain, mis. melalui pemerintah, lembaga multilateral atau LSM. Kesenjangan data ini adalah celah yang hanya bisa ditutup dari bawah ke atas.

Orang-orang di lapangan mengetahui situasi mereka sendiri dengan sangat baik, tetapi pengetahuan ini tidak muncul sebagai poin data yang dapat dengan mudah dibandingkan dan dikomunikasikan secara internasional. Sebaliknya, kerangka kerja dan indikator pelaporan sering kali ditentukan dari atas ke bawah dan tidak selalu menghasilkan data yang dapat diakses secara lokal, relevan, dan dapat dimengerti.

Untuk menghindari ekstraksi data dan memastikan partisipasi dan legitimasi upaya pemantauan, upaya ini harus dipimpin oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal itu sendiri. Selain itu, fokusnya seharusnya tidak hanya pada pendanaan tetapi juga pada dampak, bersama dengan informasi kontekstual yang lebih luas yang diperlukan untuk menginformasikan strategi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Data ini akan mencakup informasi tentang investasi di tanah masyarakat, hutang untuk pertukaran alam, hukum dan kebijakan yang diskriminatif, kriminalisasi, pembela hak asasi manusia dll.

Sudah ada pengalaman yang kuat dan relevan dengan pemantauan berbasis komunitas tentang hak dan pengembangan, seperti *Indigenous Navigator*^{xx}, yang dapat menginspirasi tindakan tambahan atau bahkan diperluas untuk memasukkan modul yang relevan pada pendanaan. Demikian pula, mekanisme pendanaan yang ditetapkan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal akan memiliki peran penting untuk dimainkan.

Baru-baru ini, Shandia juga telah memulai kegiatan percontohan untuk menyusun dan menerbitkan data ilustratif tentang pendanaan yang mencapai organisasi dan wilayah Aliansi Global Komunitas Teritorial. Pengalaman ini dapat menjadi dasar pelaporan yang distandarkan untuk mulai menghasilkan data yang dapat dibandingkan sehingga memungkinkan pemantauan dari waktu ke waktu dan di seluruh wilayah.



Meningkatkan pemantauan dari lapangan adalah upaya yang sangat penting untuk menutup kesenjangan data saat ini dan juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan jika dilakukan dengan cara yang benar, dipimpin sendiri oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Namun, ini akan membutuhkan fokus yang kuat pada pengembangan kapasitas, pengembangan metodologi dan alat, dan pelembagaan upaya, serta investasi dan dukungan donor.

Risiko dan kepercayaan

Dalam konteks menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil, pembatasan pemerintah pada pendanaan dan serangan terhadap hak asasi manusia dan pembela lingkungan, menerbitkan data mengenai pendanaan menyiratkan risiko nyata bagi organisasi dan pemimpin Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Ada contoh dimana aktivis yang menjadi target aparat keamanan karena mencoba memobilisasi sumber daya ke komunitas dan organisasi mereka mendapati dana mereka dibekukan.

Bagi banyak organisasi, akan membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi untuk berbagi data dengan orang lain. Ini adalah alasan lain mengapa kompilasi data dari lapangan harus dilakukan oleh organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal itu sendiri. Selain itu, semua tindakan pencegahan yang memungkinkan harus diambil untuk meningkatkan keamanan data. Akhirnya, data tentang pendanaan harus dipublikasikan pada tingkat yang teragregat, untuk membantu mengidentifikasi status dan tren tanpa menempatkan masing-masing organisasi dalam risiko.



PARIS ROADMAP UNTUK MELACAK DANA

Lokakarya tentang pelacakan dana untuk mitra tak tergantung, yang mengumpulkan 65 perwakilan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, donor bilateral dan penyandang dana filantropis, lembaga PBB dan multilateral, organisasi masyarakat sipil dan peneliti. Para peserta membahas masalah yang saling terkait tentang:

- Terlalu sedikitnya dana yang dialokasikan untuk mendukung peran penting Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sehubungan dengan perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, dan;
- Terlalu sedikitnya informasi yang tersedia untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan strategi yang efisien tentang alokasi, transfer modalitas dan dana yang menjangkau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Para peserta bersama-sama mengidentifikasi komponen-komponen utama berikut dari sebuah *roadmap* untuk mengatasi kesenjangan sistemik ini:

Kita perlu membangun ekosistem data berdasarkan kerangka kerja umum

Data yang kita butuhkan akan berasal dari berbagai sumber, termasuk donor bilateral, penyandang dana filantropis, lembaga multilateral, LSM dan organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Namun, untuk memastikan validitas, agregasi, dan komparabilitas, data harus dihasilkan dengan mengacu pada kerangka kerja umum. Kerangka kerja seperti itu harus mencakup klasifikasi umum, ketentuan dan standar, untuk disepakati dan diterapkan oleh berbagai aktor dalam ekosistem data.

Klasifikasi dan deskripsi yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, masing-masing, harus spesifik untuk kelompok-kelompok yang berbeda ini dan dikembangkan oleh institusi representatif mereka, sehubungan dengan hak mendasar untuk mengidentifikasi diri. Dalam kasus Masyarakat Adat, klasifikasi ini harus didasarkan dan selaras dengan instrumen internasional yang relevan, seperti deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No. 169.

Satu set materi panduan dan alat pelatihan harus dikembangkan dan dibagikan dalam berbagai bahasa untuk memastikan penggunaan dan penerapan yang luas dari kerangka kerja umum ini.

Donor

Untuk mengatasi kurangnya pendanaan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara signifikan, para donor perlu meningkatkan pendanaan mereka, membantu memobilisasi pendonor tambahan dan menyediakan pendanaan dengan cara yang paling efisien dan juga berdampak.

Poin terakhir di atas menyiratkan meningkatkan pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, termasuk melalui mekanisme pendanaan yang telah mereka buat, yang memiliki efek langsung di lapangan. Mekanisme pendanaan ini juga harus memastikan partisipasi penuh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam keputusan mengenai saluran yang paling efisien untuk pendanaan yang spesifik ke organisasi, wilayah, dan masyarakat mereka. Para donor harus meningkatkan koordinasi di antara mereka sendiri, dan bekerja dengan organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menyesuaikan format dan persyaratan ini dengan realitas di lapangan.



Untuk meningkatkan keterlacakan, para donor harus menandai dan melaporkan alokasi pendanaan mereka kepada Masyarakat Adat dan kepada Komunitas Lokal berdasarkan klasifikasi, ketentuan, dan standar kerangka kerja umum yang dijelaskan di atas.

Selain itu, mereka harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ditetapkan untuk menyusun dan mempublikasikan data tentang alokasi donor terhadap keuangan dari proyek pengembangan (OECD, IATI dan CANDID) untuk membangun pelacakan dan pemantauan sistematis ke dalam sistem statistik mereka, berdasarkan klasifikasi, ketentuan, dan standar dari kerangka kerja umum.

Salah satu elemen penting adalah agar OECD-DAC memasukkan penanda kebijakan pada Masyarakat Adat ke dalam sistem statistiknya, yang akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan OECD-DAC *Working Party on Statistics*. Elemen lain adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi dalam menganalisis deskripsi proyek naratif pada database OECD, IATI dan CANDID, menggunakan algoritma klasifikasi AI/teks. Akhirnya, ada baiknya juga menjelajahi “pendekatan ikuti aliran uang” dari IATI, yang dapat menghasilkan informasi penting tentang hubungan antara berbagai aktor dan kegiatan terkait. Secara umum, untuk memastikan kualitas data dan menghindari perkiraan yang terlalu tinggi dari pendanaan, memastikan kemungkinan pengawasan publik dan verifikasi data mikro tentang alokasi donor merupakan hal yang penting.

Untuk secara umum memperkuat perhatian OECD dan IATI terhadap kebutuhan data spesifik yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, lebih banyak donor harus didorong untuk terlibat dan juga melaporkan. Misalnya, akan menjadi penting untuk memiliki lebih banyak penyandang dana filantropis yang melaporkan pendanaannya kepada OECD atau IATI. Demikian pula, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan lembaga-lembaga ini, mis. dengan mendaftar menjadi anggota IATI dan memulai dialog dan kolaborasi dengan jaringan dan saluran kerja yang relevan di DAC, termasuk jaringan kerja lingkungan DAC dan *DAC community of practice on poverty and inequalities*, dan saluran kerja untuk pembangunan yang dipimpin secara lokal.

Mitra dan sekutu

Berbagai kategori aktor yang berperan dalam mendukung dan menyalurkan dana ke Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di antara rekan-rekan mereka, untuk secara kolektif membuat solusi yang dapat menutup kesenjangan data dalam konteks yang berbeda, sambil menjaga keselarasan dengan kerangka kerja umum yang dijelaskan di atas.

Dalam *UN-System, Inter-agency Support Group* dapat memainkan peranan penting dalam memajukan pendekatan umum untuk melacak, dengan memasukkan indikator spesifik pada pendanaan untuk Masyarakat Adat ke dalam kerangka kerja indikator pelaksanaan *System-Wide Action Plan* yang akan datang untuk pelaksanaan UNDRIP

Dalam lembaga dengan perlindungan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan aktivasi perlindungan ini sebagai titik masuk untuk juga menilai alokasi anggaran.

Di dalam kelompok LSM internasional yang merupakan penerima tingkat pertama untuk sebagian besar pendanaan donor yang dialokasikan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, sangat penting untuk melaporkan pendanaan yang diterima, dukungan yang disediakan dan pendanaan yang ditransfer ke organisasi, wilayah, dan komunitas Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal. IATI bisa menjadi platform



umum untuk pelaporan seperti itu, sementara *Path to Scale* dan jaringan lain dapat memainkan peran penting dalam memajukan pendekatan umum. Komitmen dari beberapa LSM utama yang aktif di bidang ini dapat membantu mengajak yang lainnya.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Hanya Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang dapat menilai dan melaporkan tingkat pendanaan yang mencapai organisasi, wilayah, dan komunitas masing-masing. Hal ini bukan hanya karena donor dan mitra tidak memiliki ikhtisar dana yang ditransfer, tetapi juga karena menghasilkan data tersebut bersifat sensitif dan membutuhkan tingkat kepercayaan dan legitimasi yang tinggi. Setiap upaya untuk menyusun dan mempublikasikan data tentang pendanaan yang mencapai lapangan perlu memperhitungkan risiko dan persyaratan untuk keamanan data, sesuai dengan ketentuan negara.

Oleh karena itu, organisasi, jaringan, dan platform Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal perlu memainkan peran kunci dalam ekosistem data yang dijelaskan di atas. Namun, pentingnya partisipasi penuh dan kontribusi mereka jauh melampaui penghitungan nilai anggaran. Sangat penting untuk memastikan bahwa data relevan, memberikan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dan mengukur dampak pendanaan.

Pendekatan seperti di atas untuk mengumpulkan, menganalisis, menggabungkan dan mengkomunikasikan data dapat dibangun di atas pengalaman, metodologi, mekanisme, dan platform yang sudah dikembangkan oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Lokal. Pendekatan ini termasuk berbagai mekanisme pendanaan seperti AYNI, FTM, IPAS and Dana Nusantara, *International Indigenous Forum on Biodiversity*, *Local Communities and Indigenous Peoples Platform* di bawah UNFCCC, *Indigenous Peoples Major Group* di SDG, badan penasihat yang didirikan untuk membimbing berbagai inisiatif pendanaan, Shandia platform dan inisiatif seperti *Indigenous Navigator*.

Dialog lebih lanjut, kolaborasi, dan kemitraan

Bergerak menuju ekosistem data yang dapat meningkatkan transparansi dengan mengacu pada kerangka kerja umum adalah proses yang akan membutuhkan upaya tiap lembaga, juga dialog, kolaborasi, dan kemitraan yang berkelanjutan.

Untuk melacak upaya kolektif dalam mengikuti *roadmap*, dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan, penting untuk mengambil pendekatan bertahap, dan mengidentifikasi prioritas dan tindakan konkret yang dapat dikejar dalam jangka pendek, sedang dan jangka panjang. Untuk mendapatkan efek itu, kita perlu mengidentifikasi mekanisme koordinasi yang akan mendorong kita ke depan, serta platform yang dapat kita gunakan untuk melanjutkan dialog dan kolaborasi.

Untuk tujuan koordinasi, kami merekomendasikan untuk membangun kelompok multi-aktor, "*Friends of the Paris Roadmap*", yang harus terdiri dari partisipasi dari berbagai kategori organisasi yang memiliki peran untuk dimainkan dalam implementasi roadmap (Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Donor, lembaga PBB, LSM, mekanisme pendanaan, lembaga dengan mandat pemantauan). Kelompok ini akan mengoordinasikan upaya, sementara dialog lanjutan akan terjadi dalam konteks forum dan ruang yang sudah mapan. Aliansi Global Komunitas Teritorial, dalam kerangka Shandia, akan mengambil peran utama dalam mengadakan "*Friends of the Paris Roadmap*".

Kami merekomendasikan untuk mengadakan diskusi lanjutan yang paling segera untuk konteks peristiwa berikut:



- Sesi yang akan datang dari Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat (New York, April 2024)
- Pertemuan *Path to Scale* yang akan datang
- Forum Shandia Tahunan, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (tanggal akan dikonfirmasi)
- Pertemuan konsultasi global dari *Green Climate Fund (GCF) Indigenous Peoples Advisory Group (IPAG)* yang akan diadakan di Malaysia pada tahun 2024 /tanggal akan dikonfirmasi)

Sumber daya

Upaya utama untuk memajukan Paris Roadmap merupakan bagian integral dari mandat dan fungsi institusional inti mengenai pemantauan dan pelaporan lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, seharusnya upaya ini tidak memerlukan dana tambahan. Selain itu, menyesuaikan dialog yang berkelanjutan dengan acara yang sudah mengumpulkan banyak aktor yang relevan, akan mengurangi biaya untuk mengadakan dialog dan koordinasi. Namun, dana tambahan diperlukan untuk beberapa tujuan tertentu:

- Elaborasi dan konsultasi tentang kerangka kerja umum untuk meningkatkan pelacakan, termasuk klasifikasi, ketentuan dan standar, serta materi panduan terkait
- Pengembangan metodologi dan pendekatan, pengumpulan data, dan pembangunan infrastruktur data oleh platform dan mekanisme pendanaan yang ditetapkan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
- Lebih lanjut mengeksplorasi potensi untuk menganalisis deskripsi proyek naratif dengan AI
- Mengadakan “*Friends of the Paris Roadmap*” dan forum dialog lanjutan.

ⁱ ILO, 2019: Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: *Towards an inclusive, sustainable and just future*, p. 13 Tersedia di [sini](#)

ⁱⁱ Lihat data dari [World Resources Institute](#)

ⁱⁱⁱ Lihat: <https://www.regnskog.no/en/news/falling-short>

^{iv} Lihat: <https://www.ifad.org/en/ipaf>

^v Lihat: <https://landportal.org/node/112557>

^{vi} Lihat: <https://www.forestpeoples.org/en/press-release-indigenous-peoples-global-biodiversity-framework-fund>

^{vii} Shandia, publikasi yang akan datang

^{viii} Lihat: <https://charapa.dk/directing-funds-to-rights/>

^{ix} <https://fimi-iiwf.org/en/our-programs/the-ayni-indigenous-womens-fund-program/>

^x <https://www.alianzamesoamericana.org/es/fondo-territorial-mesoamericano/>

^{xi} Lihat lebih lanjut di: nusantarafund.org

^{xii} <https://globalalliance.me/shandia/>

^{xiii} UNPFII, 2023, art. 93, tersedia di [sini](#)

^{xiv} Lihat: <https://candid.org>

^{xv} Lihat lebih lanjut tentang pengembangan algoritma di sini: <https://www.ohchr.org/en/stories/2021/03/artificial-intelligence-ensuring-human-rights-heart-sustainable-development-goals> dan di: <https://sdgdata.humanrights.dk/en/methodology>

^{xvi} Lihat <https://landportal.org/library/resources/indigenous-peoples-and-local-communities-forest-tenure-pledge-annual-report-2021>

^{xvii} Lihat daftar indikatif yang disusun oleh David Kaimowitz di sini: <https://globalalliance.me/wp-content/uploads/2023/11/Relevant-Organizations-that-Fund-Indigenous-Peoples-and-Forest-Communities.pdf>

^{xviii} Lihat: <https://www.pathtoscale.org>

^{xix} Lihat FTFG, Annual Report 2021-2022, tersedia di [sini](#)

^{xx} Lihat: <https://indigenounavigator.org>